

## Daftar Pustaka

### BUKU

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, cetakan keempat, Jakarta, Aditya Bakti, 2006
- Prof. Dr. CST. Kansil, S.H dan Cristine S.T. Kansil, S.H, M.H, Pengantar Hukum Indonesia: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cetakan kesebelas, Jakarta, Balai Pustaka, 2003
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan M. Ali Safa'at, S.H., M.H, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, cetakan pertama, Jakarta, Konstitusi Press, 2006
- Handri Raharjo, S.H, Hukum Perjanjian di Indonesia, cetakan pertama, Jakarta, PT Buku Kita, 2009
- Hans Kelsen, Pure Theory of Law oleh Hans Kelsen, terjemahan dari edisi kedua, Berkeley - Los Angeles - London, University of California Press, 1967
- Ishaq, S.H., M.Hum, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, editor Prof. Dr. Yunasril Ali, M.A, cetakan kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Ketut Sandra, Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit-Link Proteksi Sekaligus Investasi, ( Jakarta: PPM dengan PT Asuransi Jiwasraya ( persero ), 2004
- Lukman Hakim Nasution dan Toni Marsyahrul, Jakarta, Grasindo, 2008
- Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan, cetakan ke lima, Yogyakarta, Kanisius, 2007
- Prof. Dr. Mr. L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, cetakan ketiga puluh empat, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2011
- R. Santoso Brotodihardjo, S.H, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, cetakan kedua puluh satu, Bandung, PT Rafika Aditama, 2008

Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H, Pengantar Ilmu Hukum, cetakan keempat belas, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010

Untung Sukarji, Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia, cetakan ke delapan, Jakarta, Rajawali Pers, 2012

Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, cetakan keempat, Yogyakarta, Andi, 2009

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H, Mengenal Hukum, cetakan kelima, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2010

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang Undang Dasar 1945 dan Amandemen.*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 (“UU No. 2/1992”) tentang Usaha Perasuransian.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 (“PP-73”) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 (“PP-39”) tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 (“PMK-53”) tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-104/BL/2006 (“PER-104”) tentang Produk Unit Link.

Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan No. Kep-2475/LK/2004 tentang produk unit link sebagai salah satu produk asuransi jiwa.

Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 2000.

Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009.

Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan Nomor Kep-2475/LK/2004.

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, pasal 4A Ayat 3, huruf (d).

Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai pasal 8 huruf (b).

Undang Undang No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 25 ayat 1 .

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pasal 34 ayat 1.

Surat Bapepam-LK No. S-5355/BL/2008.

Surat Direktorat Jenderal Pajak No. S-492/PJ.031/2009 tanggal 18 Mei 2009 yang ditujukan kepada Asosiasi Perusahaan Asuransi Jiwa perihal biaya pengelolaan investasi.

Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 22004/PP/M.V/16/2010 tanggal 8 Februari 2010.

Permohonan Banding pokok sengketa yang sama atas tahun pajak lainnya yakni tahun pajak 2008, 2009 dan 2010 dari wajib pajak yang sama.

Putusan Pengadilan Pajak atas pokok sengketa yang sama dari wajib pajak.

Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan* Nomor 22/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 *tentang Surat Kuasa Khusus*.

Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung* Nomor 6 Tahun 1994 *tentang Surat Kuasa Khusus*.

Undang Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung bab III Pasal 28  
revisi undang-undang No. 14 Tahun 1985

Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan* PSAK No. 36 tentang Asuransi Jiwa